

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA TINGKAT KESEHATAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN BANK UMUM LAINNYA

Purwanto

Dosen STIE Solusi Bisnis Indonesia - Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No.17, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283
email: dr.purwanto.mm@gmail.com Telp: +6281227111102

ABSTRAK

BPD memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok bank umum lainnya. Selain menjalankan kegiatan bank umum, BPD juga berfungsi sebagai agen pendorong pembangunan daerah. BPD dituntut tetap memainkan peran dalam memberikan fasilitas dana pembangunan daerah, baik proyek investasi maupun modal kerja. BPD juga berfungsi sebagai kasir Pemda, seperti dana realisasi APBD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja antara BPD dan bank umum swasta nasional lainnya. Penelitian menggunakan data statistik perbankan yang bersumber dari Bank Indonesia (2013). Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa Bank BPD mempunyai profitabilitas, efisiensi dan likuiditas lebih baik dibandingkan Bank Umum lainnya. Ditinjau dari aspek permodalan dan kualitas produktif, Bank BPD mempunyai CAR dan kualitas aktiva produktif lebih rendah dari Bank Umum Lainnya, sedangkan ditinjau dari aspek likuiditas (LDR) tidak berbeda secara statistik.

Kata kunci: Bank Pembangunan Daerah, Bank Umum, perbandingan Tingkat Kesehatan Bank

ABSTRACT

Community development banks has different characteristics with groups of other commercial banks. In addition to running the activities of commercial banks, Community development banks also serves as a driver of regional agent of development. Community development banks prosecuted still play a role in facilitating regional development funds, both investment projects and working capital. Community development banks also serves as a cashier local governments, such as the realization of budget funds. The aim of this study was to determine the performance comparison between Community development banks and other national private commercial bank. Research using banking statistics sourced from Bank Indonesia (2013). The analysis was performed with descriptive approach. The study found that Community development banks has profitability, efficiency and liquidity is better than other commercial banks. Judging from the aspect of capital and productive quality, Community development banks has a CAR and lower asset quality of commercial banks Others, while viewed from the aspect of liquidity (LDR) were not statistically different.

Key word: Regional Development Bank, Performance Comparation

PENDAHULUAN

Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah bank yang didirikan dan dimiliki sebagian atau seluruh sahamnya oleh Pemerintah Daerah (Agustin, 2013: 39). BPD beroperasi seperti Bank Umum lainnya dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun Bank BPD mempunyai karakteristik berbeda dengan Bank Umum Lainnya. Keberadaan BPD tidak dapat dipisahkan dengan perekonomian daerah. Selain menjalankan kegiatan bank umum, BPD juga berfungsi sebagai kasir

Pemda, seperti dana realisasi APBD. Sehingga, BPD memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok bank lainnya (BUMN, swasta, asing dan campuran) yakni sebagian besar DPK merupakan dana milik pemerintah, khususnya Pemda. Pendirian BPD adalah untuk mendorong pembangunan di daerah. BPD diarahkan untuk menopang pembangunan infrastruktur, UMKM, pertanian, dan lain-lain kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan daerah (Sunarsip, 2009).

Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang asas-asas Ketentuan Bank Pembangunan Daerah mengatakan bahwa BPD berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang / penyimpanan kas daerah) disamping menjalankan kegiatan bisnis perbankan. Sementara itu KEPMENDAGRI No. 62 Tahun 1999 tentang pedoman organisasi dan tata kerja bank pembangunan daerah pasal 2 juga mengatakan bahwa BPD dibangun adalah untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan BPD sebagai Bank.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, pendirian BPD diantaranya adalah untuk mempercepat terlaksananya usaha-usaha pembangunan yang merata di seluruh Indonesia perlu adanya pengerahan modal dan potensi di daerah-daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah. BPD berperan dalam mengerahkan modal dan potensi di daerah-daerah dengan mengikut sertakan pihak swasta nasional progresip untuk mengusahakan pembiayaan proyek-proyek daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki potensi semakin besar di era otonomi daerah yaitusebagai akselerator sekaligus mendinamisasi perekonomian yang bertujuan untuk menggerakkan pembangunan di daerah. Pengelolaan BPD yang profesional, akuntabel, serta memiliki daya saing yang tinggi akan memperkuat peran BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai penggerak pembangunan dan ekonomi daerah. Selain berfungsi sebagai bank komersial, BPD dibebani fungsi sebagai agen pendorong pembangunan daerah (*regional agent of development*). BPD dituntut tetap memainkan peran dalam memberikan fasilitas dana pembangunan daerah, baik proyek investasi maupun modal kerja. Namun, di sisi lain sebagai bagian dari kebijakan perbankan nasional, BPD juga wajib mengikuti regulasi yang ditentukan Bank Indonesia (BI) (Marfu'ah, 2012).

Eksistensi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam peningkatan pembangunan ekonomi di daerah oleh beberapa pihak dinilai belum optimal. Peran yang belum optimal tersebut dilihat adalah peran pengumpulan dana dan penyaluran dana. Ditinjau dari peran dalam pengumpulan dana, struktur dana pihak ketiga (DPK) BPD yang lebih terfokus pada giro, yang merupakan dana termurah, sementara porsi tabungan deposito masih relatif kecil. Hal tersebut memberikan batasan dalam membiayai kredit jangka panjang/investasi di daerah. Ditinjau dari penyaluran dana, dana

BPD sebagian besar berasal dari pemerintah daerah atau pemda yang merupakan alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang justru disimpan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Padahal, dana BPD tersebut umumnya berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan dana Pemda tersebut sebagian merupakan dari alokasi dari APBN (Sunarsip, 2009). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan tingkat kesehatan bank pembangunan daerah dengan bank umum lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi, organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi” (Mahsun, 2006: 26). Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. (Mahsun, 2006 h.26).

Pengukuran kinerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja non keuangan (*non financial kinerja measurement*) dan pengukuran kinerja keuangan (*financial kinerja measurement*) (Anthony dan Govindarajan, 2007: 464). Kinerja keuangan perusahaan secara umum tidak hanya menggambarkan kapasitas asset, kewajiban, posisi ekuitas, pendapatan dan biaya serta arus kas pada titik tertentu dalam waktu, namun juga dapat menggambarkan kapasitas, strategi dan kemampuan (kapabilitas) perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya untuk mencapai tujuan perusahaan (Munawir, 2001: 91-92).

Alat bantu yang dapat digunakan untuk mengukur komponen-komponen kinerja keuangan tersebut adalah: analisis perbandingan laporan keuangan (*comparative financial statement analysis*), *common size financial statement analysis*, dan analisis rasio (Cleaves *et al.*, 2012: 44). *Comparative financial statement analysis* dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun atau beberapa tahun, dengan tujuan untuk memperoleh *trend*. *Common size financial statement analysis* dilakukan dengan memperbandingkan suatu nilai akun dengan nilai satu kelompok atau subkelompok akun. Analisis ini menekankan pada dua faktor penting yaitu sumber pendanaan dan komposisi dari aset. Analisis rasio adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu perusahaan.

Kegiatan usaha perbankan mempunyai karakteristik berbeda dibandingkan industri pada umumnya, penilaian kinerja bank berbeda dengan kinerja perusahaan lainnya. Kinerja bank dapat dilihat dari tingkat kesehatan bank. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang perbankan tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang

mengatur tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia dengan Surat Edaran No. 23/21/BPPP tanggal 28 Februari 1991.

Metode penilaian tingkat kesehatan bank tersebut diatas kemudian dikenal dengan metode CAMEL. Karena telah dilakukan perhitungan tingkat kesehatan bank berdasarkan metode CAMEL selanjutnya dilanjutkan dengan perhitungan tingkat kepatuhan bank pada beberapa ketentuan khusus, metode tersebut selanjutnya dikenal dengan istilah CAMEL Plus. Penilaian kesehatan bank meliputi 5 aspek yaitu: 1) *Capital*, untuk rasio kecukupan modal, 2) *Assets*, untuk rasio kualitas aktiva, 3) *Management*, untuk menilai kualitas manajemen, 4) *Earning*, untuk rasio-rasio rentabilitas bank, 5) *Liquidity*, untuk rasio-rasio likuiditas bank.

Agustin *et al.* (2013) menemukan bahwa jenis kepemilikan bank berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank. BPD mendorong untuk berinvestasi dalam proyek-proyek lokal. Bank umum lokal seperti mencegah aliran dana dari daerah dan memastikan investasi yang lebih efisien dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi. Bank pemerintah memiliki aset lebih rendah, biaya yang lebih tinggi dan kualitas aset yang lebih rendah dibanding bank swasta (Berger *et al.*, 2004; Berger *et al.*, 2005). Selain itu, Cornett *et al.* (2010) menemukan bahwa bank-bank pemerintah mendapatkan keuntungan yang lebih rendah, memiliki modal kecil dan resiko tinggi pinjaman, sehingga mengurangi kinerja bank. Mereka menemukan bahwa dalam krisis keuangan, bank-bank pemerintah telah melakukan lebih baik daripada bank swasta dalam hal arus kas, modal dasar dan kualitas kredit. Dan setelah krisis keuangan, bank swasta lebih baik dari bank pemerintah dalam hal rasio kecukupan modal, kualitas aset dan efisiensi manajemen.

Farazi *et al.* (2011) meneliti bank pemerintah dan bank swasta perbandingan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Dari penelitiannya menemukan perbedaan untuk ROA, ROE, total aset dan pinjaman. Bank swasta memiliki lebih tinggi dari ROA dan ROE dibandingkan dengan bank-bank pemerintah, tetapi bank-bank pemerintah memiliki aset total lebih tinggi dari bank-bank swasta. Bank-bank pemerintah lebih efisien dalam biaya daripada bank swasta. Penelitian yang berkaitan dengan Valahzaghari *et al.* (2012) yang menemukan bahwa ROA dan ROE bank-bank swasta lebih tinggi dari bank pemerintah untuk studi kasus di Iran.

Kapoor dan Gualu (2012) studi tentang delapan bank komersial Ethiopia dari 2001 sampai periode 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank swasta memiliki profitabilitas yang lebih baik, kualitas aset dan kinerja kecukupan modal. Bank-bank pemerintah lebih baik dalam langkah-langkah manajemen biaya. Dalam hal likuiditas, tidak ada perbedaan yang diamati antara bank swasta dan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data Statistik Perbankan yang bersumber dari Bank Indonesia Tahun 2006-2012. Analisis perbandingan kinerja dilakukan pendekatan deskriptif. Analisis perbandingan kinerja juga meninjau tingkat kesehatan bank dengan rasio CAMEL dalam aspek kinerja keuangan. Rasio CAMEL tersebut di *proxy* dengan enam rasio keuangan yaitu: CAR untuk aspek permodalan, APYD terhadap Aktiva Produktif untuk aspek kualitas aset, ROA untuk aspek rentabilitas, BOPO untuk aspek manajemen, LDR dan Aktiva terhadap Pasiva-Likuid untuk aspek likuiditas.

a. Permodalan

Penilaian pertama adalah aspek permodalan, dimana aspek ini menilai permodalan yang dimiliki bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang ditetapkan BI, yaitu perbandingan antara Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). CAR yaitu indikator kecukupan modal merupakan perbandingan antara jumlah modal dan aktiva tertimbang yang diperoleh dengan rumus :

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

b. Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produktif atau *Productive Assets* atau sering disebut dengan *Earning Assets* adalah semua aktiva yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Ada empat macam jenis aktiva produktif yaitu : giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, tagihan wesel ekspor, obligasi rekapitalisasi Pemerintah, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, tagihan akseptasi dan penyertaan saham.

Penilaian aset, sesuai dengan Peraturan BI adalah dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) adalah Aktiva produktif baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian. Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) antara lain dihitung dengan membandingkan APYD terhadap Total Aktiva Produktif, dinyatakan dalam persen.

c. *Earning*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen Bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka kemungkinan Bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio ini dihitung dengan :

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

d. BO/PO (Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Kenaikan pendapatan bunga diikuti dengan kenaikan aktiva produktif. Kenaikan aktiva produktif lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan pendapatan bunga yang menyebabkan NIM mengalami peningkatan. Rasio BO/PO sering disebut rasio efisiensi, ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen Bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan Bank yang bersangkutan. Rasio ini dirumuskan:

$$BOPO = \frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

e. Likuiditas

Kinerja likuiditas dalam penelitian ini diukur dari LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas Bank dengan pembagian antara jumlah kredit terhadap dana pihak tiga. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah kemampuan likuiditas Bank yang bersangkutan, rasio ini dihitung dengan:

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Seluruh Dana yang dihipunkan + Modal sendiri}} \times 100\%$$

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada Tahun 2006-2012 kinerja BPD mengalami pertumbuhan yang sangat berarti. Hal itu tercermin dari peningkatan beberapa indikator kinerja utama. Total aktiva BPD mengalami peningkatan dari Rp 159,476 triliun (tahun 2006) menjadi Rp 366,685 triliun (pada tahun 2012). Pada tahun 2012 posisi aktiva Bank BPD telah mencapai angka Rp 366,685 triliun dari keseluruhan aktiva 26 BPD yang tersebar dalam 1.193 kantor cabang atau setara dengan 23,88% dari seluruh aktiva Bank Umum Nasional. Pada Tahun 2006-2009, pertumbuhan aktiva BPD di bawah bank umum nasional, namun pada tahun 2010-2012 pertumbuhan aktiva BPD di atas bank umum nasional. Pada Tahun 2010 pada saat pertumbuhan bank umum nasional tumbuh negatif sebesar 2,6%, Bank BPD mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,6%.

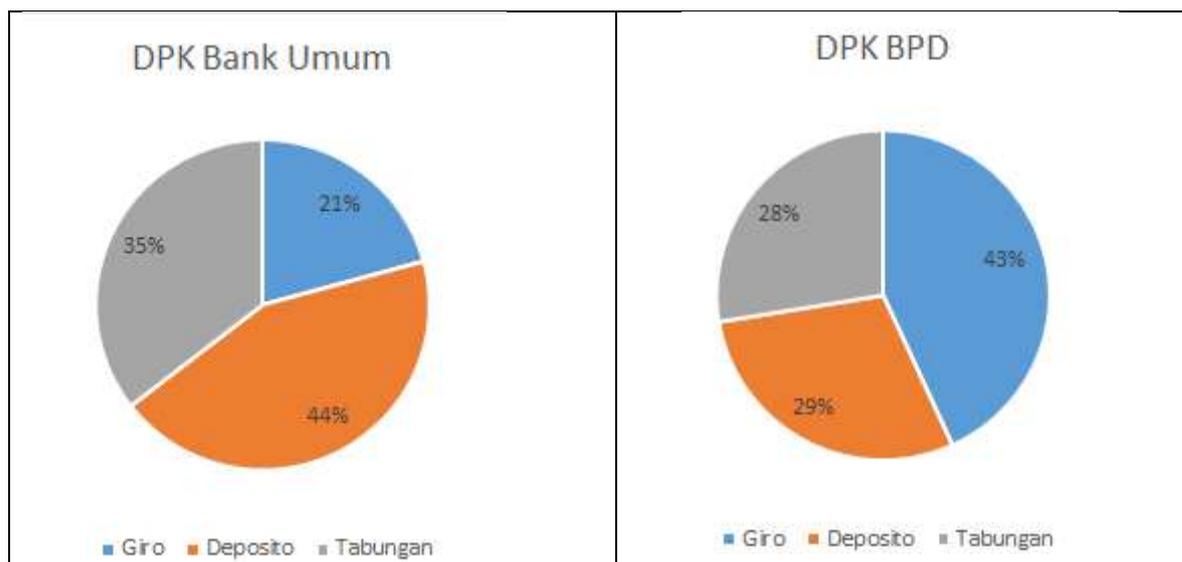
Tabel 1. Perbandingan Perkembangan Aktiva BPD dan Bank Umum Swasta Nasional Tahun 2006-2012

	Tahun						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A. Total Aktiva (Triliun Rp)							
Bank Umum	621.212	741.988	847.563	979.078	943.789	1.328.168	1.535.343
BPD	159.476	170.012	185.252	200.542	205.754	304.003	366.685
B. Pertumbuhan Aktiva (%)							
Bank Umum		19,44	14,23	15,52	(3,60)	40,73	15,60
BPD		6,61	8,96	8,25	2,60	47,75	20,62

Sumber: Bank Indonesia (2013)

Ditinjau dari penghimpunan dana, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) selama tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp 278,535 triliun dari Rp 129,141 triliun pada tahun 2006. DPK meningkat lebih dari 2 (x) selama periode 7 (tujuh) tahun (2006-2012). DPK BPD pada tahun 2012 sebesar 8,63% total DPK Bank Umum Nasional.

Salah satu karakteristik BPD adalah proporsi sumberdana Pihak Ketiga dalam bentuk Giro yang lebih besar dari Bank Umum lainnya. Porsi sumberdana BPD dari pihak ketiga dalam bentuk Giro adalah 43% pada tahun 2006-2012. Proporsi tersebut lebih tinggi dibandingkan Bank Umum Lainnya yaitu sebesar 21% pada periode tahun yang sama. Proporsi giro yang tinggi disebabkan penempatan dana jangka pendek dari Pemerintah Daerah. Proporsi Giro pada BPD tinggi dibanding bank umum yang merupakan karakteristik pelayanan BPD, namun demikian sumberdana dalam bentuk tabungan dan deposito juga selalu meningkatkan tiap tahun.



Gambar 1. Dana Pihak Ketiga BPD dan Bank Umum Lainnya Tahun 2006-2012

Sumber: diolah dari data Bank Indonesia (2013)

Berbeda dari perbankan secara umum, fokus DPK BPD adalah giro. Walaupun giro adalah dana termurah, namun perlu digarisbawahi bahwa giro juga yang paling tidak stabil/volatile. Porsi tabungan dan deposito di BPD masih relatif kecil, sehingga cukup sulit bagi BPD untuk menjadi bank yang dapat membiayai kredit jangka panjang/investasi. Implikasinya, sebagaimana terlihat pada Gambar 2, dari sebanyak 26 BPD yang beroperasi di Indonesia, porsi kreditnya hanya sebesar 7,9% dari total kredit Bank Umum nasional. Proporsi deposito dan tabungan lebih rendah dari Bank Umum lainnya, namun pertumbuhan Deposito BPD (19,26%) lebih tinggi dibanding Bank Umum lainnya (12,48%) pada periode tahun 2006-2012. Posisi pertumbuhan tabungan BPD (22,77%) mendekati Bank Umum lainnya (24,19%).

Tabel 2. Dana Pihak Ketiga BPD dan Bank Umum Swasta Nasional Tahun 2006-2012

	Tahun							Rata-rata
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
DPK (Rp Triliun)								
BANK UMUM								
DPK	1.287.102	1.510.834	1.753.292	1.973.042	2.338.824	2.644.742	3.225.198	2.104.719
Rupiah	1.093.445	1.284.797	1.460.443	1.656.625	1.990.518	2.259.450	2.757.530	1.786.115
Giro	249.564	309.335	307.743	332.729	383.808	444.626	567.801	370.801
Deposito	510.008	540.982	675.983	758.280	928.089	1.045.395	1.010.488	781.318
Tabungan	333.873	434.480	476.717	565.616	678.621	769.429	1.179.242	633.997
Valas	193.657	226.037	292.849	316.417	348.306	385.292	467.668	318.604
BPD								
DPK	129.141	134.287	143.262	152.251	183.624	235.265	278.535	179.481
Rupiah	129.065	134.077	143.027	151.425	182.685	234.097	277.555	178.847
Giro	74.692	69.123	70.653	63.553	61.725	88.033	112.715	77.213
Deposito	29.365	31.750	34.877	44.148	67.365	78.734	79.938	52.311
Tabungan	25.008	33.205	37.497	43.724	53.595	67.329	84.903	49.323
Valas	75	209	235	826	939	1.169	980	633
Perkembangan DPK (%)								
BANK UMUM								
DPK		17,38	16,05	12,53	18,54	13,08	21,95	16,59
Rupiah		17,50	13,67	13,43	20,16	13,51	22,04	16,72
Giro		23,95	(0,51)	8,12	15,35	15,85	27,70	15,08
Deposito		6,07	24,95	12,17	22,39	12,64	(3,34)	12,48
Tabungan		30,13	9,72	18,65	19,98	13,38	53,26	24,19
Valas		16,72	29,56	8,05	10,08	10,62	21,38	16,07
BPD								
DPK		3,98	6,68	6,27	20,61	28,12	18,39	14,01
Rupiah		3,88	6,67	5,87	20,64	28,14	18,56	13,96
Giro		(7,46)	2,21	(10,05)	(2,88)	42,62	28,04	8,75
Deposito		8,12	9,85	26,58	52,59	16,88	1,53	19,26
Tabungan		32,78	12,93	16,61	22,58	25,63	26,10	22,77
Valas		177,47	12,19	251,57	13,72	24,44	(16,20)	77,20

Sumber: diolah dari data Bank Indonesia (2013)

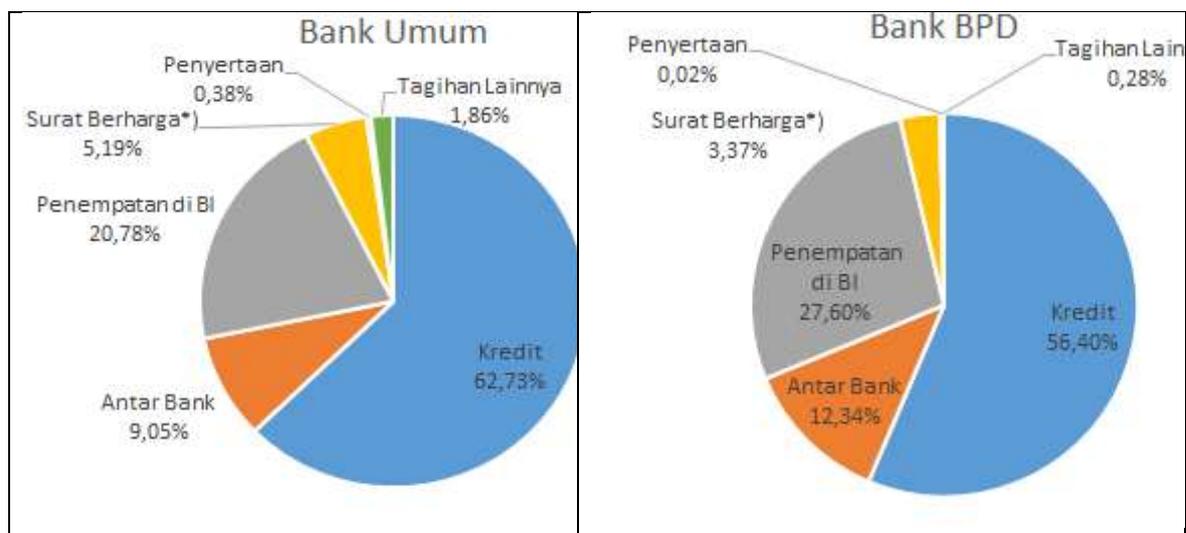
Tabel 3. Aktivitas Penyaluran Dana BPD dan Bank Umum Swasta Nasional Tahun 2006-2011

		Tahun					Rata-rata	
		2006	2007	2008	2009	2010		2011
BANK UMUM								
a.	Kredit	792.297	1.002.012	1.307.688	1.437.930	1.765.845	2.200.094	1.417.644
b.	Antar Bank	156.906	139.777	213.779	261.474	228.549	226.942	204.571
c.	Penempatan di BI	343.455	418.269	322.333	397.897	581.901	753.986	469.640
d.	Surat Berharga*)	55.988	108.007	113.851	134.960	133.454	157.025	117.214
e.	Penyertaan	5.924	5.620	6.626	10.010	12.356	10.968	8.584
f.	Tagihan Lainnya	25.803	28.835	50.944	39.908	43.807	63.448	42.124
BPD								
a.	Kredit	55.955	71.881	96.385	120.754	143.707	175.702	110.731
b.	Antar Bank	21.139	14.786	19.517	22.312	29.634	37.963	24.225
c.	Penempatan di BI	69.589	62.827	45.986	32.609	47.372	66.726	54.185
d.	Surat Berharga*)	3.654	9.503	10.212	9.750	3.359	3.217	6.615
e.	Penyertaan	13	34	34	36	36	46	33
f.	Tagihan Lainnya	9	24	341	434	490	2.049	558

*) tidak termasuk obligasi rekap

Sumber: diolah dari data Bank Indonesia (2013)

Bank Pembangunan Daerah (BPD) diharapkan dapat berperan optimal dalam mendukung pembangunan di daerah, salah satunya melalui penyaluran kredit. Namun, peran tersebut belum maksimal. Kredit yang disalurkan BPD pada tahun 2012 mencapai Rp 110,731 triliun. Kredit yang disalurkan BPD memang mengalami peningkatan tiap tahun, namun demikian porsi alokasi dana BPD dalam bentuk SBI juga sangat tinggi, di mana rata-rata proporsi penempatan di BI di tahun 2006-2012 adalah 20,78% dari total Penyaluran Dana BPD. DPK BPD didominasi oleh dana pemda yang bersifat jangka pendek dan tidak dapat disalurkan dalam bentuk kredit. Penempatan ke BI merupakan tindakan rasional, mengingat dana yang volalitasnya tinggi, sehingga paling rendah risikonya jika ditempatkan dalam bentuk BI. Hal tersebut menunjukkan BPD dianggap belum sepenuhnya menjalankan fungsi intermediasi dan menjadi penggerak utama bagi pembangunan ekonomi di daerah.



Gambar 2. Penyaluran Dana BPD dan Bank Umum Lainnya Tahun 2006-2012

Sumber: diolah dari data Bank Indonesia (2013)

Laba tahun berjalan BPD seluruh Indonesia per Juni 2007 sebesar Rp2,22 triliun, sementara sepanjang tahun sebelumnya naik sebesar 46,74%. Porsi laba tahun berjalan terhadap perbankan nasional mencapai sebesar 13,20%.

Tabel 3. Rasio Keuangan Utama BPD dan Bank Umum Swasta Nasional Tahun 2006-2011

VARIABEL	BANK	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Mean	T-test
CAR (%)	BANK UMUM	21,27	19,30	16,76	17,42	17,18	16,05	17,43	17,92	0,06
	BPD	19,12	18,35	16,82	15,82	16,68	14,33	18,02	17,02	
APYD terhadap Aktiva Produktif (%)	BANK UMUM	3,91	3,03	2,95	2,83	2,36	2,00		2,85	0,01
	BPD	0,81	0,99	1,00	1,39	1,66	1,49		1,22	
ROA (%)	BANK UMUM	2,64	2,78	2,33	2,60	2,86	3,03	3,11	2,77	0,02
	BPD	3,38	3,08	3,70	3,65	3,82	3,36	2,90	3,41	
BOPO (%)	BANK UMUM	86,98	84,05	88,59	86,63	86,14	85,42	74,10	84,56	0,01
	BPD	76,15	76,06	73,04	73,64	77,65	79,14	75,29	75,85	
LDR (%)	BANK UMUM	61,56	66,32	74,58	72,88	75,21	78,77	83,58	73,27	0,14
	BPD	43,33	53,53	67,28	79,31	78,26	74,74	78,57	67,86	
Aktiva terhadap Pasiva-Likuid (%)	BANK UMUM	3,06	3,55	4,49	4,03	3,99	3,80	18,45	5,91	0,00
	BPD	6,26	7,74	8,91	11,08	10,80	9,46	22,93	11,02	

Sumber: Bank Indonesia (2013)

Bank BPD secara umum mempunyai CAR, Kualitas Aktiva Produktif, rasio operasi BOPO lebih rendah dibanding Bank Umum Lainnya, namun mempunyai profitabilitas dan likuiditas lebih tinggi dibandingkan Bank Umum Lainnya.

Nilai CAR Bank BPD pada Tahun 2006-2012 adalah antara 14,33% sampai dengan 19,53% atau diatas 8%. Nilai rata-rata CAR Bank BPD (17,02%) lebih rendah dari Bank Umum Lainnya (17,92%). Nilai Kualitas Aktiva Produktif ditinjau dari Rasio APYD terhadap Aktiva Produktif Bank BPD pada Tahun 2006-2012 adalah antara 0,81% sampai dengan 1,49% atau diatas rasio standard yang disyaratkan BI (0%), menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek KAP kondisi kinerja BPD sehat. Nilai rata-rata KAP Bank BPD (1,22%) lebih rendah dari Bank Umum Lainnya (1,85%).

Aktiva non-produktif adalah aset bank yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense accounts*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), aktiva diklasifikasikan ke dalam aktiva tidak bermasalah (*performing*) sebagai “Lancar” atau “Dalam Perhatian Khusus” dan aktiva bermasalah (*non-performing*) sebagai “Kurang Lancar”, “Diragukan” atau “Macet”.

Saldo aktiva produktif dihapusbukukan dari masing-masing cadangan penyisihan kerugian pada saat manajemen berpendapat bahwa aktiva produktif tersebut sudah tidak dapat tertagih lagi. Penerimaan kembali aktiva produktif yang telah dihapusbukukan dicatat

sebagai penambahan penyisihan/estimasi kerugian selama tahun berjalan. Jika terdapat kelebihan dari penerimaan pokok kredit, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga.

Pada tahun 2006-2012, BPD selalu menghasilkan profit positif. Nilai rata-rata ROA Bank BPD sebesar 3,41% menunjukkan bahwa Bank BPD mampu menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 3,41% dibanding aset yang dimiliki. Nilai rata-rata ROA tersebut (3,41%) yang diatas Bank Umum lainnya (2,77%).

Rasio BO/PO Bank BPD tahun 2006 -2012 dibawah rasio standard yang disyaratkan BI (100%), menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek manajemen kondisi kinerja Bank BPD sehat. Pendapatan operasional Bank BPD Tbk Tahun 2006 -2012 cenderung mengalami peningkatan, sedangkan biaya operasi justru mengalami penurunan, sehingga rasio perbandingan biaya operasional terhadap pendapatan operasional mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan efisiensi yang dilakukan Bank BPD. Nilai rata-rata Rasio BOPO Bank BPD tersebut (75,85 %) yang dibawah rata-rata Bank Umum lainnya (84,56%) yang menunjukkan kinerja BOPO Bank BPD lebih baik dibanding Bank Umum lainnya.

Total kredit yang disalurkan Bank BPD pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 88,874 triliun, sedangkan nilai total dana yang dihimpun Bank BPD pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 137,846 triliun dan modal sendiri senilai Rp 18,878 triliun sehingga rasio LDR yang merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan seluruh dana yang dihimpun ditambah modal sendiri Tahun 2012 adalah sebesar 57%.

Nilai rata-rata Rasio LDR Bank BPD tahun 2006-2012 dibawah rasio standard yang disyaratkan BI (100%), menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek likuiditas kondisi kinerja Bank BPD sehat. Nilai rata-rata Rasio LDR Bank BPD tersebut (67,86 %) yang dibawah rata-rata Bank Umum lainnya (73,27%) yang menunjukkan kinerja LDR Bank BPD lebih baik dibanding Bank Umum lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Bank BPD mempunyai profitabilitas, efisiensi dan likuiditas lebih baik dibandingkan Bank Umum lainnya. Ditinjau dari aspek permodalan dan kualitas produktif, Bank BPD mempunyai CAR dan kualitas aktiva produktif lebih rendah dari Bank Umum Lainnya, sedangkan ditinjau dari aspek likuiditas (LDR) tidak berbeda secara statistik.

Seluruh indikator tersebut di atas menunjukkan harapan baru bagi perkembangan BPD di masa yang akan datang. Namun demikian masih ada beberapa kendala yang perlu dicatat. Pertama, aktiva di luar kredit yang dimiliki masih dominan dalam membentuk komposisi aktiva BPD. Pola

pemberian kredit seperti ini membawa konsekuensi undisbursed loan rendah, loan to deposit ratio (LDR) rendah, net interest margin (NIM) tinggi, non-performing loan (NPL) rendah dan penempatan pada SBI tinggi. Semua problem tersebut sebetulnya bermuara pada *economies of scale* dan *economies of scope* BPD. Sehingga solusinya adalah dengan melakukan perubahan struktural sehingga BPD tidak perlu terlalu menggantungkan diri pada pemerintah daerah. Bahkan bisa menjadi bank yang tangguh untuk skala nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, 2001, *Pengukuran Kinerja Keuangan Bank*, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Agustin, H. Rohani MD., Kamarun, N.T.M., 2013. Financial Performance and Ownership Structure: A Comparison Study between Community Development Banks, Government Banks and Private Banks in Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 3 (12); 38-49
- Anthony, R. N., dan Govindarajan, V. 2007. *Sistem Pengendalian. Manajemen*. Edisi Ke-11. Bukur ke-1. Jakarta: Salemba Empat'
- Berger A. N., Demircug-Kunt A., Levine R., & Haubrich J. G., 2004. Bank concentration and competition: An evolution in the making. *Journal of Money, Credit and Banking*, 36(3), 433-451.
- Berger, A. N., Clarke, G. R., Cull, R., Klapper, L., & Udell, G. F., 2005. Corporate governance and bank performance: A joint analysis of the static, selection, and dynamic effects of domestic, foreign, and state ownership. *Journal of Banking and Finance*, 29(8-9), 2179-2221.
- Cleaves, C', Hobbs, M., Noble. J. 2012. *Business Mathematics*, 9th Edition Publisher: Prentice Hall
- Cornett, M. M., Guo, L., Khaksari, S., & Tehranian, H., 2010. The impact of state ownership on performance differences in privately-owned versus state-owned banks: An international comparison. *Journal Financial Intermediation*, 19, 74-94.
- Farazi, S., Feyen, E., & Rocha, 2011. Bank Ownership and Performance in the Middle East and North Africa Region. *Policy Research Working Paper 5620*. The World Bank Middle East and North Africa Region Financial and Private Sector Development Unit & Financial and Private Sector Development Financial Systems Department.
- Hakenes, H. and Schnabel, I., (2006), "The Threat of Capital Drain: A Rationale for Public Banks?" *GESY Discussion Paper* No. 107, University of Manheim.
- Kapur, D., & Gualu A. K., 2012. Financial performance and ownership structure of Ethiopian commercial banks *Journal of Economics and International Finance*, 4 (1), 1-8.
- Kepmendagri No. 62 Tahun 1999 tentang *pedoman organisasi dan tata kerja bank pembangunan daerah*
- Mahsun, M, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*,. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Marfu'ah, 2012. "Peran BPD sebagai Agent Of Development". Arikel diakses secara online 24/01/2015 di http://isnamarfuah.blogspot.co.id/2012_11_01_archive.html
- Munawir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta.

Sunarsip, 2009. "Relasi Bank Pembangunan Daerah dan Perekonomian Daerah".
<https://id.wordpress.com/tag/relasi-bank-pembangunan-daerah-dan-perekonomian-daerah/>

Surat Edaran No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang *Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*

Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang *asas-asas Ketentuan Bank Pembangunan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1962 Tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1962 Tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah*

Valahzagherd, M.K., Koozehgar, P., Valehzagherad, H.K., & Memarzade, M., 2012. The Comparison of Private State Banks and Other Banks in Iran. *European Journal of Social Sciences*, 27(4),532-545.